ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.12, November 2026

Transformasi Digital dalam Sistem Layanan Edukasi dan Pencegahan Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua

Sriyono[1], Simon Abdi K Frank[2], Rostini Anwar[3]
[1,2,3]Universitas Cenderawasih, Indonesia
email: rosanwar073@gmail.com

Article History:
Received: 21 September 2026
Revised: 22 Oktober 2026
Accepted: 06 November 2026

Keywords: *Transformasi Digital, Edukasi Pencegahan Narkotika, Layanan Public.*

Abstrak: *Penyalahgunaan narkotika menjadi permasalahan sosial yang serius di Indonesia, termasuk di wilayah Papua yang memiliki karakteristik geografis dan sosial-budaya yang unik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transformasi digital dalam sistem layanan edukasi dan pencegahan narkotika pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua (BNNP Papua), mengidentifikasi kendala penerapannya, serta merumuskan model pengembangan layanan digital yang adaptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNNP Papua telah memanfaatkan media sosial dan situs web resmi sebagai saluran penyebaran informasi, namun belum memiliki platform digital mandiri dan terintegrasi. Kendala utama meliputi ketimpangan infrastruktur jaringan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum memadainya kebijakan dan anggaran khusus, serta keragaman tingkat literasi digital masyarakat. Pemanfaatan media digital efektif memperluas jangkauan informasi, namun masih terbatas pada komunikasi satu arah dan belum sepenuhnya dapat menggantikan pendekatan tatap muka. Model pengembangan yang diusulkan menekankan pada pendekatan bertahap berbasis aksesibilitas wilayah, penyesuaian konten dengan kearifan lokal, penguatan kemitraan kelembagaan, serta integrasi layanan digital dengan kegiatan konvensional.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta keamanan masyarakat di Indonesia (Latip dkk., 2024). Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui unit daerahnya memiliki mandat utama dalam melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

narkotika. Di Provinsi Papua, BNNP Papua melaksanakan program edukasi dan sosialisasi melalui kegiatan tatap muka seperti penyuluhan di sekolah, komunitas, dan lembaga pemerintahan. Namun, pelaksanaan tersebut menghadapi kendala luasnya wilayah, kondisi topografi yang beragam, serta keterbatasan sumber daya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara langsung (Millensyah, 2023).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong inovasi layanan publik melalui transformasi digital, yang memungkinkan perluasan jangkauan, peningkatan efisiensi, dan interaksi yang lebih responsif dengan masyarakat (Hasanah dkk., 2024; Westerman dkk., 2014). Dalam konteks pencegahan narkotika, teknologi digital berpotensi menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda, serta menyajikan informasi dalam format yang menarik dan mudah diakses kapan saja. Meskipun demikian, implementasi transformasi digital pada layanan edukasi dan pencegahan narkotika di tingkat daerah belum berjalan optimal, dan kajian akademik terkait topik ini di wilayah Papua masih sangat terbatas.

Penelitian ini menjawab kesenjangan tersebut dengan menganalisis kondisi nyata penerapan transformasi digital di BNNP Papua, hambatan yang dihadapi, serta merumuskan model pengembangan layanan digital yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan literatur transformasi digital dalam layanan publik serta menjadi rujukan strategis bagi BNNP Papua dalam memperkuat program pencegahan narkotika.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses, praktik, serta kendala implementasi transformasi digital dalam layanan edukasi dan pencegahan narkotika di BNNP Papua. Lokasi penelitian berkedudukan di Kota Jayapura, dengan cakupan analisis mencakup wilayah kerja BNNP Papua secara keseluruhan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: (1) wawancara mendalam dengan petugas yang menangani fungsi penyuluhan, hubungan masyarakat, dan manajemen informasi di BNNP Papua; (2) observasi langsung terhadap pemanfaatan saluran digital dan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan; serta (3) kajian dokumen meliputi rencana kerja, laporan kegiatan, dan materi edukasi yang telah disebarkan.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikategorikan ke dalam tema utama meliputi kondisi implementasi, kendala penerapan, efektivitas pemanfaatan media, serta model pengembangan layanan digital. Hasil analisis kemudian disusun menjadi temuan yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan serta rekomendasi yang sesuai dengan konteks sosial-budaya dan infrastruktur wilayah Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.Kondisi Implementasi Transformasi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNNP Papua telah memulai langkah transformasi digital melalui pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan Facebook, serta situs web resmi BNN RI sebagai saluran penyebaran informasi. Materi yang disebarkan meliputi bahaya narkotika, jenis-jenis narkotika yang beredar, serta langkah pencegahan yang disajikan dalam bentuk infografis, foto kegiatan, dan video pendek. Pemanfaatan ini telah memperluas jangkauan informasi dibandingkan metode konvensional yang terbatas pada pertemuan fisik.

Namun, transformasi digital belum berjalan secara menyeluruh dan terstruktur. Belum terdapat platform digital mandiri, aplikasi seluler, atau sistem informasi terpadu yang dikelola

secara khusus oleh BNNP Papua. Pengelolaan konten masih bersifat insidental dan menjadi tugas tambahan petugas tanpa standar operasional yang baku, sehingga frekuensi pembaruan materi belum konsisten. Komunikasi yang terjadi cenderung satu arah; masyarakat menerima informasi namun jarang memberikan tanggapan atau berpartisipasi aktif dalam diskusi melalui saluran digital tersebut. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Kane dkk. (2015) bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, melainkan juga pada kesiapan organisasi, kepemimpinan, dan budaya kerja yang mendukung inovasi.

2.Kendala dan Tantangan Penerapan

Penelitian ini mengidentifikasi empat kelompok kendala utama yang menghambat optimalisasi layanan edukasi digital:

Pertama, ketimpangan infrastruktur jaringan internet. Wilayah perkotaan memiliki akses yang relatif lebih baik, sementara wilayah pedalaman dan kepulauan masih menghadapi keterbatasan sinyal dan kecepatan jaringan. Hal ini menyebabkan materi berbentuk video atau berukuran besar sulit diakses oleh sebagian besar masyarakat.

Kedua, keterbatasan kapasitas dan jumlah sumber daya manusia. Belum ada petugas yang secara khusus bertugas mengelola teknologi informasi dan konten digital. Kemampuan dalam menyusun konten yang menarik, memproduksi materi audiovisual berkualitas, serta menganalisis respons masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Ketiga, belum adanya kebijakan, rencana kerja, dan alokasi anggaran khusus untuk pengembangan layanan digital. Kegiatan pemanfaatan media digital masih berjalan berdasarkan inisiatif individu dan kebutuhan sesaat, sehingga keberlanjutannya tidak terjamin.

Keempat, keragaman sosial-budaya dan tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata. Sebagian masyarakat lebih menyukai pendekatan komunikasi tatap muka yang sesuai dengan kearifan lokal, sehingga layanan digital tidak dapat sepenuhnya menggantikan metode konvensional.

3.Efektivitas Pemanfaatan Media dan Preferensi Masyarakat

Pemanfaatan saluran digital telah menunjukkan dampak positif dalam memperluas jangkauan informasi secara cepat dan dapat diakses kapan saja. Namun, efektivitasnya lebih dominan pada tahap penyebaran informasi awal dan peningkatan kesadaran umum. Untuk pembentukan pemahaman mendalam, perubahan sikap, dan pendampingan yang berkelanjutan, pendekatan tatap muka masih diperlukan. Hal ini konsisten dengan temuan Latip dkk. (2024) bahwa layanan digital memperkuat transparansi dan aksesibilitas, namun interaksi langsung tetap berperan penting dalam membangun kepercayaan dan perubahan perilaku.

Ditinjau dari jenis konten, materi yang disajikan secara sederhana, menarik secara visual, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami mendapat respons paling baik. Konten yang menampilkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pejabat daerah sebagai penyampai pesan juga lebih banyak dilihat dan dibagikan, karena dianggap lebih relevan dan dekat dengan kehidupan masyarakat setempat.

4.Model Pengembangan Layanan Edukasi Digital

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini menghasilkan model pengembangan layanan edukasi dan pencegahan narkotika berbasis transformasi digital yang adaptif terhadap kondisi Papua. Model ini mencakup empat komponen utama:

Pendekatan bertahap berbasis aksesibilitas wilayah: Wilayah dibagi menjadi tiga kategori

berdasarkan ketersediaan jaringan. Wilayah dengan akses baik dilayani dengan konten audiovisual dan interaktif; wilayah dengan akses terbatas disediakan materi berukuran ringan; dan wilayah yang sulit dijangkau didistribusikan materi melalui media penyimpanan fisik kepada petugas penyuluh.

Pengelolaan konten yang relevan dan berkelanjutan: Materi disesuaikan dengan konteks kearifan lokal, disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami, serta melibatkan tokoh masyarakat sebagai penyampai pesan. Pengelolaan didasarkan pada jadwal dan pembagian tugas yang tetap agar keteraturan pembaruan materi terjaga.

Penguatan kemitraan strategis: BNNP Papua menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas teknologi untuk membantu penyusunan konten, pengembangan sistem, serta pelatihan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Integrasi layanan digital dan konvensional: Saluran digital berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti kegiatan tatap muka. Materi yang disebarkan secara daring diperdalam pada pertemuan langsung, dan hasil kegiatan tatap muka didokumentasikan untuk disebarluaskan kembali melalui saluran digital.

KESIMPULAN

Implementasi transformasi digital di BNNP Papua telah menunjukkan langkah awal melalui pemanfaatan media sosial dan situs web, namun belum berjalan secara optimal dan menyeluruh. Belum terdapat sistem terpadu, pengelolaan masih bersifat insidental, dan komunikasi cenderung satu arah. Kendala utama meliputi ketimpangan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, belum memadainya kebijakan dan anggaran khusus, serta keragaman sosial-budaya dan literasi digital masyarakat.

Pemanfaatan media digital efektif memperluas jangkauan informasi, namun belum cukup untuk membangun pemahaman mendalam dan perubahan perilaku tanpa didukung pendekatan tatap muka. Model pengembangan yang diusulkan menekankan pada pendekatan bertahap, penyesuaian konten dengan kearifan lokal, kemitraan kelembagaan, serta integrasi layanan digital dan konvensional. Model ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi BNNP Papua dalam membangun sistem layanan edukasi dan pencegahan narkotika yang lebih efektif, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji secara mendalam dampak layanan digital terhadap perubahan perilaku masyarakat serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam perancangan konten agar semakin sesuai dengan kebutuhan nyata di berbagai wilayah Papua.

DAFTAR REFERENSI

Badan Narkotika Nasional. (2022). Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. BNN Republik Indonesia.

Badan Narkotika Nasional. (2023). Laporan tahunan Badan Narkotika Nasional. BNN Republik Indonesia.

Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2012). Promoting transparency and accountability through ICTs, social media, and collaborative e-government. Transforming Government: People, Process and Policy, 6(1), 78–91. https://doi.org/10.1108/17506161211214831

Hasanah, U., Rahman, A., & Pratama, R. (2024). Digital transformation in local government services: Challenges and opportunities in the era of digital governance. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10(2), 145–156.

Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D., & Buckley, N. (2015). Strategy, not technology,

drives digital transformation. MIT Sloan Management Review and Deloitte University Press.

Latip, M. S., Rahman, A., & Abdullah, M. (2024). Digital public services and citizen engagement in the era of smart governance. Journal of Public Administration Research, 12(1), 34–48.

Millensyah, D. (2023). Transformasi digital dalam pelayanan publik di era pemerintahan digital. Jurnal Digital Government, 5(1), 21–33.

Prajapati, N., & Sharma, A. (2013). The role of social media in e-government services. International Journal of Computer Science and Information Technologies, 4(2), 299–303.

Schwab, K. (2017). The fourth industrial revolution. Crown Business.

Sisilianingsih, D., Nugroho, R., & Prasetyo, B. (2023). Digital transformation in public services during the COVID-19 pandemic. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 10(3), 513–522.

United Nations. (2022). United Nations e-government survey 2022: The future of digital government. United Nations Department of Economic and Social Affairs.

Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). Leading digital: Turning technology into business transformation. MIT Sloan Management Review.